

LAPORAN AKHIR KEGIATAN TAHUN 2025



SUB KEGIATAN

PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK

PROGRAM KEGIATAN

PENYELENGGARAN PERSANDIAN UNTUK KEAMANAN INFORMASI



Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan



Jl. Dr. M. Hatta – Painan, (0756) 231 2227
Email : kominfo@pesisirselatankab.go.id
Email Persandian : csirt@pesisirselatankab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, **Laporan Tahunan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025** ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan, dan layanan persandian serta keamanan informasi yang telah dilaksanakan oleh Bidang Statistik dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan laporan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja, penggunaan anggaran, perkembangan implementasi tanda tangan elektronik, evaluasi Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI), pengelolaan CSIRT, serta berbagai kegiatan pendukung keamanan siber yang dilaksanakan sepanjang tahun. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi strategis dalam peningkatan tata kelola keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun-tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak, baik perangkat daerah, instansi vertikal, maupun pemangku kepentingan lainnya, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Diskominfo Provinsi Sumatera Barat, serta seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi, koordinasi, dan komitmen yang diberikan dalam mendukung terselenggaranya keamanan informasi di daerah.

Semoga laporan tahunan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola SPBE, serta pengembangan kebijakan keamanan informasi di Kabupaten Pesisir Selatan. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan di masa mendatang.

Painan, Desember 2025

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN .	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup	2
C. Tujuan dan Manfaat	3
1. Tujuan	3
2. Manfaat	3
BAB II PEMBAHASAN	4
A. Realisasi Anggaran	4
B. Tolak Ukur Kinerja	5
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	6
A. Hasil Kegiatan	6
B. Melakukan Koordinasi, Konsultasi dan Kegiatan terkait tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh Persandian	9
BAB IV PENUTUP	33
A. Kesimpulan	33
B. Saran	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat menuntut pemerintah untuk melakukan transformasi digital secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta keamanan pengelolaan data dan informasi. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk memastikan bahwa seluruh sistem elektronik, perangkat layanan publik, dan mekanisme kerja digital terlindungi dari ancaman siber, penyalahgunaan data, maupun gangguan operasional lainnya.

Salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya keamanan informasi adalah penyelenggaraan fungsi persandian yang meliputi pengamanan informasi strategis, pemanfaatan sertifikat elektronik, manajemen insiden keamanan siber, dan penyusunan kebijakan serta standar operasional keamanan informasi. Kegiatan ini merupakan mandat dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta regulasi daerah terkait pengelolaan keamanan informasi.

Tahun 2025 menjadi periode penting bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam memperkuat tata kelola keamanan informasi. Tantangan berupa meningkatnya penggunaan aplikasi digital, rendahnya literasi keamanan informasi sebagian ASN, belum optimalnya pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE), serta keberadaan potensi ancaman siber seperti phishing, peretasan data, dan serangan terhadap layanan publik mengharuskan adanya peningkatan pengawasan, pengendalian, dan koordinasi yang lebih intensif.

Selain itu, penerapan **Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) versi 5.0** yang mengacu pada standar terbaru ISO/IEC 27001:2022 menuntut Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyiapkan dokumen kebijakan, prosedur, dan bukti dukung yang lebih komprehensif. Pembentukan dan penguatan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) juga menjadi kebutuhan mendesak mengingat meningkatnya volume insiden yang berpotensi mengganggu layanan pemerintahan.

Dengan kondisi tersebut, Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan serangkaian program penguatan keamanan informasi yang mencakup monitoring pemanfaatan TTE di kecamatan, pembinaan penggunaan aplikasi Srikandi, penyusunan Indeks KAMI, koordinasi dengan instansi pusat dan provinsi, penanganan insiden siber, serta kegiatan sosialisasi dan literasi keamanan informasi bagi perangkat daerah.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan keamanan informasi selama Tahun Anggaran 2025. Laporan ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan dasar perencanaan untuk peningkatan tata kelola keamanan informasi pada tahun-tahun berikutnya.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 meliputi seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penerapan, pengamanan, dan pemeliharaan informasi pada sistem elektronik perangkat daerah. Kegiatan ini mencakup pengelolaan sertifikat elektronik atau Tanda Tangan Elektronik (TTE), pembinaan serta pengawasan penggunaan aplikasi persuratan dan kearsipan digital seperti Srikandi, pemantauan keamanan sistem melalui identifikasi dan penanganan insiden siber, serta pengelolaan layanan CSIRT. Selain itu, ruang lingkup kegiatan juga mencakup penyusunan dan evaluasi Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI), koordinasi dengan instansi pusat dan daerah dalam peningkatan tata kelola keamanan informasi, pelaksanaan sosialisasi dan literasi keamanan

siber bagi perangkat daerah, serta penyusunan dokumen, laporan, dan administrasi pendukung terkait penyelenggaraan persandian.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan tahunan ini adalah untuk mendokumentasikan dan melaporkan pelaksanaan program persandian dan keamanan informasi sepanjang Tahun Anggaran 2025, termasuk capaian kinerja, penggunaan anggaran, hasil kegiatan, serta permasalahan yang dihadapi. Laporan ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi, rekomendasi tindak lanjut, dan acuan dalam peningkatan penyelenggaraan keamanan informasi di tahun-tahun berikutnya

2. Manfaat

Penulisan Laporan Tahunan Kegiatan bermanfaat sebagai dokumentasi resmi atas pelaksanaan program selama satu tahun, menjadi dasar evaluasi kinerja, serta membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keamanan informasi

BAB II

PEMBAHASAN

A. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik ini dianggarkan sebesar Rp 61.911.278,- kemudian dilakukan efisiensi anggaran menjadi 41.556.278,- rekening Belanja Perjalanan Dinas Biasa menjadi 19.917.500,- dan rekening Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota menjadi 6.296.500,- realisasi kegiatan fisik tercapai 100%, dan anggaran terealisasi Rp 41.493.718,- atau sebesar 99,8%. Dari anggaran yang direncanakan tersebut tersisa sebesar Rp 62.560,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN								
REALISASI KEGIATAN PADA ANGGARAN PERUBAHAN T.A. 2025								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								
No.	Kode Rekening	Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi Kegiatan	Sisa Anggaran	Total Realisasi Tahun 2025	Persentase (%)
	1	2	3	4	5	6 = 4-5		10 = 8/3 x 100%
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis	Rp 1.253.850	Rp 1.253.850	Rp 1.253.850	Rp -	Rp 1.253.850	100%
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp 1.631.428	Rp 1.632.328	Rp 1.632.328	Rp -	Rp 1.632.328	100%
3	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp -	Rp 50.000	100%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 1.650.000	Rp 1.650.000	Rp 1.650.000	Rp -	Rp 1.650.000	100%
5	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000	Rp -	Rp 2.550.000	100%
6	5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniawan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp -	Rp 200.000	100%
7	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 30.895.000	Rp 19.917.500	Rp 19.855.740	Rp 61.760	Rp 19.855.740	100%
8	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 7.175.000	Rp 6.296.500	Rp 6.295.700	Rp 800	Rp 6.295.700	100%
9	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp 12.000.000	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	Rp -	Rp 8.000.000	100%
10	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp 4.500.000	Rp -		Rp -		
	JUMLAH		Rp 61.911.278	Rp 41.556.178	Rp 41.493.618	Rp 62.560	Rp 41.493.618	99,8%

B. Tolak Ukur Kinerja

Tolak Ukur Kinerja merupakan capaian *income* dan *outcome* dari sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Pada Pengamanan Informasi dan Sistem Elektronik pada Tahun 2025 ini realisasi hasilnya melebihi dari target yang ditetapkan, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Indikator			Target	Realisasi
Capaian Program	:	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	- 100 %	- 100 %
Masukan	:	Jumlah Dana Yang Dibutuhkan	Rp . 41.556.278,-	Rp 41.493.718,- (99 %)
Keluaran	:	Jumlah pengamanan sistem elektronik	- 100 sertifikat Elektronik	3 Laporan : 1) Laporan TTE 2) Laporan Indeks Kami - Skor Penilaian Mandiri 3) Laporan Akhir Kegiatan
Hasil	:	Terlaksananya peningkatan keamanan informasi pemerintah daerah	12 bulan	12 bulan

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Hasil Kegiatan

1. Bertanggung jawab sebagai admin *secure email* Sanapati. Email Sanapati merupakan salah satu peralatan sandi yang berfungsi sebagai jaring komunikasi Sandi antara pusat dan daerah.
2. Melakukan kegiatan pembuatan laporan Indeks kami dan laporan CSIRT Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025.
3. Melaksanakan Penerbitan Sertifikat Elektronik/TTE kepada seluruh pegawai RSUD M.Zein Painan untuk Penerapan pada Aplikasi SIMGos (Sistem Informasi Manajemen Generik Open Source) yang didalamnya terdapat Simtem Rekam Medis Elektronik, sebanyak 670 SE
4. Melakukan Indestifikasi Kerentanan pada Website Nagari dan ditemukan beberapa kerentanan seperti Link Inject dan SQL Injection
5. Menerima Laporan dari Bug Hunter yang menemukan beberapa kerentanan pada website Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan memberikan Apresiasi pada Bug Hunter berupa e-Sertifikat.
6. Menerima Laporan Indikasi aktifitas generic trojan RAT dan web defacement pada aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan oleh BSSN
7. Terlaksananya Uji Komunikasi Tim Tanggap Insiden Siber sektor pemerintahan (Gov-CISRT) melalui enam kali pertemuan terstruktur selama satu tahun oleh BSSN, guna memastikan kelancaran koordinasi, kecepatan respons, serta kesiapan dalam menghadapi potensi insiden siber
8. Terlaksananya kegiatan Tim Tanggap Insiden Siber Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh BSSN secara berkala setiap bulan selama satu tahun melalui platform zoom sebagaiupaya penguatan koordinasi, respon dan kesiapsiagaan terhadap insiden siber.

9. Laporan Tanda Tangan Elektronik ASN Perangkat daerah Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan/RSUD/Puskesmas/Nagari
10. Terlaksananya Bimbingan Teknis Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Keamanan Informasi di Era Pemerintahan Digital pada Perangkat Daerah se-Kabupaten Pesisir Selatan
11. Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi tentang keamanan informasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi/Kecamatan
12. Terlaksananya Pelatihan Teknis Dasar Persandian yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Siber dan Sandi Negara untuk meningkatkan kompetensi dasar sumber daya manusia dalam bidang persandian serta memperkuat kapasitas pengamanan informasi di lingkup instansi pemerintah.
13. Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan
 - a. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - c. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - d. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - e. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025
 - f. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 555.2/284/Kpts/BPT-PS /2022 tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber Kabupaten Pesisir Selatan;

g. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 400.3.3.7/25/KOMINFO-PS/2025 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Keamanan Informasi di Era Pemerintahan Digital pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

14. Pembuatan Sertifikat Elektronik (Tanda Tangan Digital)

Pembuatan Tanda Tangan Digital pada Tahun 2025 ini ditargetkan sebanyak 100 yang telah terdaftar memiliki sertifikat elektronik sedangkan yang telah terbit baru sampai saat di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 808 sertifikat elektronik, Dicabut sebanyak 4 sertifikat elektronik dikarenakan ASN tersebut pensiun dan mutasi/pindah tugas dan 243 sertifikat elektronik dikarenakan telah expired dengan rekap data sebagai berikut:

REKAP DATA SERTIFIKAT ELEKTRONIK YANG SUDAH TERBIT

Statistik Pengelolaan Sertifikat Elektronik

Jumlah Sertifikat Elektronik berdasarkan periode waktu

Bulan	Jumlah Sertifikat Berdasarkan Status			
	Terbit Baru	Dicabut	Diperpanjang	Dihentikan (expired)
Januari	18	0	0	3
Februari	715	0	0	3
Maret	7	0	0	13
April	6	0	0	1
Mei	6	0	0	10

Bulan	Jumlah Sertifikat Berdasarkan Status			
	Terbit Baru	Dicabut	Diperpanjang	Dihentikan (expired)
Juli	7	2	0	3
Agustus	14	0	0	9
September	10	0	0	5
Oktober	7	1	0	141
November	13	1	0	54

15. Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Keamanan Informasi di Era Pemerintahan Digital pada Perangkat Daerah se Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 di Hotel Giszella Pasar Baru Kecamatan Bayang.

B. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan kegiatan terkait tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh persandian di daerah ke kecamatan, antar Dinas dan ke Dinas Kominfo Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Aplikasi Srikandi ke Kecamatan Silaut pada tanggal 26 s/d 27 Ferbruari 2025 dan Kecamatan Air Pura pada tanggal 14 Maret 2025

Hasil dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

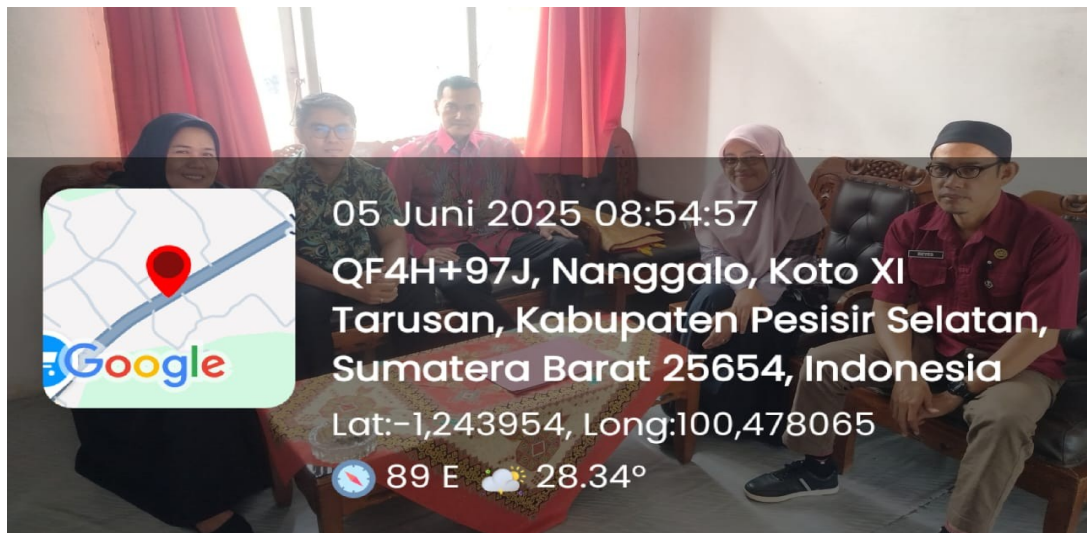
- 1) Tindak lanjut kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan tanda tangan elektronik pada Aplikasi Srikandi ke Kecamatan Silaut diterima langsung oleh Bapak Camat dan Sekretaris Camat Tusri, S.Pd sebagai kepala seksi kesejahteraan sosial
- 2) Hasil tindak lanjut kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Aplikasi Srikadi ke Kecamatan Silaut adalah jaringan sering tidak stabil, listrik sering mati sehingga sinyal seluler sering hilang, berdampak pada TTE surat menyurat di Kecamatan Silaut tidak bisa di emplementasikan secara optimal sehingga surat menyurat lebih memilih secara konvensional
- 3) Bandwith kuota per OPD masing-masing didapat 50-100 mbps, kedepannya agar penggunaan internet hanya untuk kinerja kantor biar lebih optimal.
- 4) Dokumentasi



2. Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Tanda Tangan Digital pada Aplikasi Srikandi ke Kecamatan Koto XI Tarusan pada tanggal 5 Juni 2025

Hasil dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kunjungan ke Kantor Camat Kecamatan Koto XI Tarusan langsung diterima oleh Sekretaris Kecamatan (Fitriyeni, J.ST).
- 2) Pengguna Tanda Tangan Elektronik di Kecamatan Koto XI Tarusan banyak yang lupa dengan passphrase atau passwordnya karena jarang digunakan.
- 3) Akun srikandi ASN Kecamatan Koto XI Tarusan sudah banyak yang tidak aktif atau terkunci karena jarang diakses.
- 4) Tim dari Kominfo menyarankan agar semua ASN yang lupa password Tanda Tangan Elektronik untuk melakukan Reset Password kepada Admin Kominfo. Begitu juga dengan akun Srikandi yang sudah terkunci agar melaporkan kepada Admin Kecamatan/Kabupaten untuk dilakukan pembaruan data.
- 5) Dokumentasi





3. Penyerahan Laporan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dan Koordinasi Penanganan Insiden Keamanan Informasi Ke Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat

Hasil dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan saat ini memiliki dua aplikasi resmi yang terintegrasi dengan TTE yaitu OpenSID dan OpenDK yang pengelolaannya berada dibawah Diskominfo, khususnya bidang Aptika .
- 2) Namun, tercatat pada system BSrE terdapat empat pengajuan integrasi aplikasi, meskipun hanya dua yang telah menyelesaikan proses integrasi Monitoring traffic TTE dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi Wazuh dengan koordinasi dengan Tim Persandian.
- 3) Kabupaten Pesisir Selatan juga telah mengirimkan Laporan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik ke Balai Besar Sertifikasi Elektronik guna memenuhi kewajiban pada dokumen PKS.

- 4) Untuk masalah penanganan Keamanan Informasi Diskominfo Provinsi menyarankan perlu melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap system dan aplikasi secara berkala dengan tools yang ada.
- 5) Melakukan monitoring secara berkala terhadap seluruh sistem elektronik yang digunakan dan melaporkan setiap anomali atau indikasi potensi pelanggaran keamanan informasi.
- 6) Mengidentifikasi dan mendokumentasikan insiden.
- 7) Dokumentasi :



4. Rekonsiliasi Pengisian Indeks KAMI Versi 5.0 dan Koordinasi rencana pelaksanaan sosialisasi Kemanan Informasi ke Diskominfotik Prov. Sumbar

Hasil dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan khususnya diskominfo sebagai penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur atau sarana untuk pengamanan sistem elektronik.
- 2) Indeks KAMI merupakan alat bantu asesmen, evaluasi maturitas dan indikator penerapan Kemanan Informasi atau sebagai perangkat untuk memeberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja kemanan informasi kepada pimpinan instansi.
- 3) Indeks KAMI Versi 5.0 memiliki perbedaan yang cukup besar dibandingkan dengan versi-versi sebelumnya diantaranya :
 - a. SNI ISO/IEC 27001:2022 yang sebelumnya SNI ISO/IEC 27001:2013
 - b. Area Penilaian 7 Area dan 1 Suplemen yang sebelumnya 6 area dan 3 suplemen
 - c. Jumlah control 185 + 27 suplemen yang sebelumnya 141 + 53 suplemen
 - d. Pengembangan Kontrol pihak ke-3 ianntaranya : threat inteligece, business continuity plan (BCP), retensi data, data masking, cloud services, monitoring aktivitas, managemen konfigurasi, web filter dan data loss prevention.
- 4) Hal yang perlu dipersiapkan untuk pengisian Indeks KAMI versi 5.0 diantaranya:
 - a. Identitas Responden
 - b. Penentuan ruang lingkup Pemerintah Daerah
 - c. Pemilihan Sistem Elektronik
 - d. Dokumen bukti dukung yang akan dilampirkan.

- 5) Untuk Tahun 2025 Diskominfo Pesisir Selatan memiliki target nilai Indeks KAMI (Keamanan Informasi) sebesar 350 (Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar). Menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan banyaknya indikator penilaian baru dan kurangnya dalam pemenuhan bukti dukung (Karena Pemda Pessel belum memiliki kebijakan sesuai indikator yang diminta)
- 6) Kedepannya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan akan menyelesaikan bukti dukung yang diminta sesuai dengan pertanyaan indikator yang ada seperti : Kebijakan Surat Keputusan Bupati tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi, Prosedur-prosedur yang berhubungan dengan Keamanan Informasi dan kebijakan lainnya sehingga mampu meningkatkan nilai Indeks KAMI pada Tahun berikutnya
- 7) Terkait Rencana Pelaksanaan Sosialisasi di Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan akan mengundang narasumber dari Diskominfo Provinsi Sumatera Barat
- 8) Dokumentasi





5. Melakukan Rapat kegiatan pengisian instrumen indeks KAMI, Hasil dari rapat tersebut adalah sebagai berikut :

- Dibuka oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan Bapak Isman, SE, M.Si. Rapat ini berfokus kepada kegiatan pengisian instrumen indeks KAMI 5.0.
- Pengisian instrument ini meliputi beberapa bagian seperti :
 1. Kategori Sistem Elektronik
 2. Tata Kelola
 3. Resiko
 4. Kerangka Kerja
 5. Pengelolaan Aset
 6. Teknologi
 7. PDP
 8. Suplemen
- Progres pengisian Indeks KAMI dipresentasikan per kategori, guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian di setiap area.
- Pengisian Indeks KAMI ini merupakan langkah strategis untuk persiapan penilaian langsung oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Selain itu, progres dan hasil Indeks KAMI menjadi bagian dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika

6. Penyerahan Laporan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dan Koordinasi Penanganan Insiden Keamanan Informasi Ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

Hasil dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan saat ini memiliki dua aplikasi resmi yang terintegrasi dengan TTE yaitu OpenSID dan OpenDK yang pengelolaannya berada dibawah Diskominfo, khususnya bidang Aptika .
- 2) Namun, tercatat pada system BSRé terdapat empat pengajuan integrasi aplikasi, meskipun hanya dua yang telah menyelesaikan proses integrasi Monitoring traffic TTE dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi Wazuh dengan koordinasi dengan Tim Persandian.
- 3) Kabupaten Pesisir Selatan juga telah mengirimkan Laporan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik ke Balai Besar Sertifikasi Elektronik guna memenuhi kewajiban pada dokumen PKS.
- 4) Untuk masalah penanganan Keamanan Informasi Diskominfo Provinsi menyarankan perlu melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap system dan aplikasi secara berkala dengan tools yang ada.
- 5) Melakukan monitoring secara berkala terhadap seluruh sistem elektronik yang digunakan dan melaporkan setiap anomali atau indikasi potensi pelanggaran keamanan informasi.
- 6) Mengidentifikasi dan mendokumentasikan insiden
- 7) Dokumentasi :





7. Melakukan Rapat Pendaftaran integrasi Sertifikat Elektronik aplikasi Simgos milik RSUD M. Zein Painan bersama tim BSrE (BSSN), hasil dari rapat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam diskusi tim (BSrE) Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSN) Badan Siber dan Sandi Negara dengan Tenaga IT RSUD M.Zein didampingi oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian Kabupaten Pesisir Selatan membahas tentang Penafdataran aplikasi Simgos milik RSUD M.Zein Painan bisa terintegrasi atau terdaftar di BSrE supaya bisa menggunakan Tanda Tangan Elektronik.
- 2) Aplikasi Simgos ini merupakan aplikasi open source yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dan dikelola oleh RSUD M.Zein sesuai dengan kebutannya. Aplikasi ini memiliki fungsi sebagai pelaporan data pasien dalam klaim BPJS.
- 3) Sebelumnya Dinas Kominfo sudah pernah melakukan kerjasama dengan BSrE. Saat ini ada 2 aplikasi yang sudah terdaftar di BSrE yaitu, aplikasi Opendesa (Sinar) dan OpenDK.
- 4) Dinas Kominfo Sudah memiliki server esign clien sehingga pihak IT RSUD M.Zein tinggal mempersiapkan aplikasi Simgos sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diberikan oleh pihak BSrE. Jika Aplikasi Simgos sudah siap maka akan dilakukan pertemuan kedua untuk uji aplikasi.

5) Dokumentasi :



8. Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi dan Singkronisasi Implementasi Kebijakan Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Dalam Rangka Peningkatan Literasi Digital tentang Bahaya Konten Negatif di Provinsi Sumatera Barat.

Hasil dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Acara Rapat Koordinasi yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia di Ballroom The ZHM Premiere Hotel Padang dibuka langsung Oleh Sekda Provinsi Sumatera Barat (Arry Yuswandi, S.KM., M.KM) dan Asisten Deputi

Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam (Syaiful Garyadi, Ak., M.M.).

2) Narasumber pertama adalah Direktur Analisis dan Pemeriksaan PPATK membahas materi Peran PPATK dalam Analisis Transaksi Keuangan Perjudian Online, beberapa poinnya antara lain :

- Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Data Keuangan Sumatera Barat peringkat ke 13 Nasional jumlah pemain judi online terbanyak mencapai 194.909 orang pada Tahun 2024. Kabupaten Pesisir Selatan menjadi peringkat ke 2 terbanyak pemain judi online di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 16.374.
- **Pemain judi online = Berhutang** . Artinya setiap pemain judol terdeteksi juga memiliki transaksi pinjaman pada rekeningnya dengan PJK non-bank atau Pinjaman Online.
- Sekema penyembunyian harta kekayaan oleh pelek judi online biasanya dari rekening pass-by di transfer ke rekening atas nama orang lain atau ke crypto dan valuta asing sehingga sulit untuk dideteksi.
- Upaya penanganan yang dilakukan adalah PPATK dalam menganalisa transaksi perjudian online adalah dengan melakukan pemeriksaan pada rekening penampung deposit yang kemudian kalau ditemukan akan dilakukan pemblokiran pada nomor rekening tersebut.

3) Narasumber oleh Direktur Pengendalian Ruang Digital pada Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi membahas tentang Mekanisme Penangan Konten Negatif (Judol) antara lain :

- Dalam sehari orang Indonesia rata-rata menggunakan 1/3 waktunya dengan internet yaitu 7 jam apakah menggunakan smartphone, laptop ataupun komputer.
- 10 modus penipuan terbanyak pada saat mengakses internet yaitu : jual beli online, judi online, transaksi video call sex (VCS),

investasi online fiktif, sosia engineering, scamming, prostitusi online, pinjaman online, web phishing dan kejahatan lainnya.

- Modus persebaran judi online dengan cara mereka menyisipkan iklan judi online di situs milik pemerintahan dan pendidikan, aplikasi beretema judi online, sms dan whatsapp blast yang berisi link judi online, komentar pada youtube dan saweran pada social media.
- Penagawasan dan pemblokiran konten perjudian yang dilakukan oleh Kemkomdigi antaranya melakukan patrol internet khusus untuk web, url atau aplikasi bermuatan konten judi online, melakukan riset dan analisa modus baru judi online, pemanfaatan AI, pengenaan denda konten yang mengandung perjudian platform dan pemblokiran terhadap nomor seluler dan aplikasi yang terindikasi digunakan sebagai sarana dan transaksi judi online.

4) Direktur Jaminan Sosial pada Ditjen Linjamsos Kemensos menyampaikan materi Kebijakan Kemensos dalam penanganan penyalahgunaan dana bansos yang terindikasi aktivitas judi online, beberapa poin antara lain :

- Kondisionalitas dan Indeks bantuan social PKH tahun 2025 ada beberapa kategori: Kesejahteraan Sosial yang diberikan kepada disabilitas berat dan lansia 60 tahun ke atas, Kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, bayi usia 0-11 bulan dan anak usia dini, Pendidikan yang diberikan kepada anak sekolah SD, SMP dan SMA.
- Ditemukan nomor rekening penerima bansos yang rata-rata umurnya sudah lanjut usia terindikasi atau terlibat judi online yang mana pengguna direntan umur tersebut tidak bisa menggunakan smartphone. Kenyataannya adalah rekening tersebut digunakan oleh keluarga atau orang lain sebagai rekening pass by untuk menampung hasil judi online dan pinjaman online.
- Langkah yang dilakukan Kemensos dalam kasus rekening penerima bansos terindikasi judi online adalah kerjasama

Kemensos dengan PPATK untuk melakukan proses skrining calon penerima bansos, mencoret nama penerima bansos yang terbukti terlibat dalam judi online dan menggantikan dengan penerima yang lebih alayak ari golongan miskin dan miskin ekstrim dan mensosilisasikan bahaya judi online kepada KPM melalui petugas pendamping PKH.

5) Dokumentasi :



9. Sharing Informasi tentang Implementasi Penanganan Insiden Keamanan Siber pada Website CSIRT ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, Hasil dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kunjungan Tim Pessel-Csirt ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi disambut oleh Kepala Bidang e-Government Bapak Rahmat dan Kepala Seksi Persandian Bapak Ridwan.
- 2) Website CSIRT Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi dibentuk pada Tahun 2024 dimana Bukittinggi ditunjuk oleh Provinsi untuk menjadi *pilot project* pembentukan csirt 39 kota se Indonesia.
- 3) Sejak dibentuknya Tim Csirt Kota Bukittinggi. Website csirt mereka belum ada menerima insiden keamanan informasi yang begitu berarti atau sampai mengakibatkan terganggunya layanan sistem mereka.
- 4) Insiden kemanan siber yang sering terjadi di Website Pemerintahan Kota Bukittinggi adalah Web Defacement dan iklan Judi Online.
- 5) Untuk Pemantauan mereka menanam wazuh pada server mereka. Untuk aplikasi dan system informasi kebanyakan mereka menggunakan Pusat data Nasional milik Kementerian Komigi di Jakarta.
- 6) Dokumentasi :





10. Rapat awal rencana kegiatan Sosialisasi Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Keamanan Informasi di Era Pemerintahan Digital, Hasil dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut

1) Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Keamanan Informasi di Era Pemerintahan Digital akan dilaksanakan pada:

- a. Hari/Tanggal : Kamis, 6 November 2025
- b. Tempat: Hotel Giszella, Pasar Baru Bayang

2) Peserta Sosialisasi

Peserta kegiatan terdiri dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan jumlah peserta sebanyak $\pm$ 40 orang.

3) Narasumber Kegiatan

- a. Narasumber Utama: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Sumatera Barat.
- b. Narasumber Pendamping: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

4) Pembentukan Panitia Penyelenggara

Telah disepakati pembentukan panitia penyelenggara kegiatan yang terdiri atas:

- a. Penasehat : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Penanggung Jawab: Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

- c. Ketua Panitia : Kepala Bidang Statistik dan Persandian
- d. Seksi Acara, Konsumsi, Dokumentasi, dan Perlengkapan: akan ditetapkan lebih lanjut melalui surat keputusan Kepala Dinas.

5) Hal-hal Lain

- a. Panitia diminta segera menyiapkan undangan, susunan acara, dan kebutuhan teknis kegiatan.
- b. Koordinasi dengan pihak hotel dan narasumber dilakukan paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan.

6) Dokumentasi :



11. Melakukan Sosialisasi Peningkatan Keamanan Informasi di Era Pemerintahan Digital se Kabupaten Pesisir Selatan pada Tanggal 6 November 2026 yag bertempat dihotel Giszella Pasar Baru Bayang, Hasil dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Acara sosialisasi ini bertempat di Giszella Hotel dengan jumlah peserta lebih kurang sebanyak 40 peserta yang langsung dibuka oleh Pj. Sekretaris Daerah Bapak Evafauza Yuliasman mewakili Bupati Pesisir Selatan yang didampigi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pesisir Selatan.
- 2) Dalam sambutannya Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Evafauza Yuliasman menegaskan bahwa informasi kini telah menjadi aset strategis pemerintah yang harus dijaga dan dikelola secara profesional. “Pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat tata kelola keamanan informasi di seluruh perangkat daerah. Penguatan kesadaran aparatur dalam menjaga data dan dokumen menjadi hal penting dalam mencegah risiko kebocoran maupun penyalahgunaan informasi. Ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi bagian dari integritas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
- 3) Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat bernama Afdal Rahman, S.T., M. Kom jabatan sebagai Pranata Komputer pada Bidang Siber dan Sandi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat yang ahli dalam ITE dan Digital Forensik.
- 4) Materi yang disampaikan oleh narasumber membahas tentang, antara lain :
 - Perlindungan Data Pribadi
 - Kemanan Siber (Cyber Security)
 - Malware dan jenisnya
 - Cybercrime dan jenisnya
 - Undang-undang ITE

5) Dokumentasi :



12. Monitoring penggunaan tanda tangan elektronik ke Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Hasil dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kunjungan ke Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan langsung diterima oleh Kepala Seksi Pelayanan (Jhony Gusril, S.H.).
- 2) Pengguna Tanda Tangan Elektronik di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan banyak yang lupa dengan passphrase atau passwordnya karena jarang digunakan.

- 3) Akun srikandi ASN Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan sudah banyak yang tidak aktif atau terkunci karena jarang diakses.
- 4) Tim dari Kominfo menyarankan agar semua ASN yang lupa password Tanda Tangan Elektronik untuk melakukan Reset Password kepada Admin Kominfo. Begitu juga dengan akun Srikandi yang sudah terkunci agar melaporkan kepada Admin Kecamatan/Kabupaten untuk dilakukan pembaruan data.
- 5) Selain itu Pegawai Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan juga bertanya tentang masalah absensi online, website PPID dan beberapa aplikasi lainnya.
- 6) Dokumentasi :



13. Melakukan Rapat akhir kegiatan Sosialisasi Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Keamanan Informasi di Era Pemerintahan Digital, Hasil dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Kegiatan

- Kegiatan Sosialisasi telah dilaksanakan pada:
 - Hari/Tanggal : Kamis, 6 November 2025
 - Tempat : Hotel Giszella, Pasar Baru Bayang
- Kegiatan berjalan **lancar**, sesuai agenda yang telah disusun dalam rapat awal
- Kehadiran peserta mencapai sekitar **± 40 orang**, terdiri dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

2) Materi dan Narasumber

- Materi yang disampaikan meliputi :
 - Kebijakan Penerapan Sertifikat Elektronik
 - Perlindungan Data Pribadi
 - Tugas Bidang Persandian dan Pengenalan Konsep Keamanan Siber
 - Pemanfaatan TTE dalam Keamanan Informasi
- Narasumber :
 - Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Sumatera Barat.
 - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

3) Evaluasi Kegiatan

- Peserta antusias, materi relevan.
- Kendala : waktu kegiatan melebihi jadwal dan peserta meminta materi tambahan.
- Tindak lanjut : materi dibagikan ke peserta melalui WhatsApp group perangkat daerah.

4) Dokumentasi :



14. Monitoring Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Ke Kecamatan Lengayang, Hasil dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kunjungan ke Kantor Camat Lengayang diterima oleh Kepala Seksi Pelayanan (Yuherman, S.Sos) dan beberapa orang staf di Kecamatan.
- 2) Pengguna Tanda Tangan Elektronik di Kecamatan Lengayang banyak yang lupa dengan passphrase atau passwordnya karena jarang digunakan. Namun ada juga beberapa yang masih ingat karena sering digunakan menjadi Pelaksana Tugas Wali Nagari untuk penandatanganan surat pada aplikasi di Nagari.
- 3) Akun srikandi ASN Kecamatan Lengayang sudah banyak yang tidak aktif atau terkunci karena jarang diakses. Kebanyakan pembuatan surat di srikandi fokus ke satu akun saja walaupun berbeda seksi.
- 4) Selain itu Pegawai Kecamatan Lengayang juga bertanya tentang penyelesaian masalah daerah yang masih blank spot di Kenagarian Kambang Utara.

5) Dokumentasi :



15. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggran 2026 di Grand Basko Hotel Padang,

Hasil dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Pembahasan Anggran dengan Tim Banggar DPRD dan TAPD Kabupaten Pesisir Selatan, Bidang Statistik dan Persandian ada 3 Kegiatan untuk Tahun 2026, tidak jauh berbeda dengan Tahun 2025 yakni tentang Metadata, Indeks Pembangunan Statistik, Tanda Tangan Elektronik, Keamanan Aplikasi, Sosialisasi tentang Data Statistik Sektoral, Percetakan Buku PSDA, PDRB.

Tim Banggar DPRD dan TAPD Kabupaten Pesisir Selatan menyarankan seluruh kegiatan Bidang Statistik dan Persandian harus dilaksanakan seperti tahun tahun sebelumnya terutama peserta lebih banyak terutama kepada kaula muda (generasi Z) Kecamatan, Nagari, Pendamping Desa, Pendamping PKH, Kader, dll



16. Menghadiri undangan kegiatan Be Fest 2025 dengan tema “Kolaborasi dengan Digitalisasi” dengan subtema “Digital Trust” di Gedung Sasono Langen Budoyo (TMII)

Hasil dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Acara dibuka oleh Deputy Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah dan Pembangunan Manusia BSSN, Letjen TNI Drs. Nugroho Sulisty Budi, Mm, dilanjutkan dengan diskusi peneltentang Penguatan Empat Pilar Ketahanan Pangan di Era Trasnporamsi Digital melalui Ekosistem Digital Trust dan Digital Trust pada Pemerintah Digital.

2. Kegiatan berlangsung selama sehari penuh yang diikuti oleh Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Dirjen Dikcapil Kemendagri, para Kepala Daerah dari berbagai Provinsi dan Kabupaten.
3. Membangun Ekosistem Digital yang aman, andal dan mampu melindungi data masyarakat dalam pelayanan publik pemerintahan. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan digital (digital trust) dalam menjalankan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan layanan publik.



BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 telah terlaksana dengan baik dan sesuai rencana. Seluruh program berjalan efektif dengan capaian fisik 100% dan realisasi anggaran sebesar 99,8 %. Kegiatan yang meliputi pengelolaan Tanda Tangan Elektronik, penyusunan Indeks KAMI, penguatan CSIRT, monitoring keamanan sistem, serta sosialisasi keamanan informasi terbukti mampu meningkatkan kesiapan perangkat daerah dalam pengelolaan keamanan informasi. Melalui upaya tersebut, kapasitas pemerintah daerah dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi semakin kuat serta mendukung peningkatan tata kelola SPBE di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Saran

1. Peningkatan Literasi Keamanan Informasi

Perlu dilakukan peningkatan pemahaman dan keterampilan ASN dalam penggunaan TTE, aplikasi Srikandi, serta praktik keamanan informasi agar implementasinya lebih optimal.

2. Penguatan Infrastruktur Teknologi

Diperlukan peningkatan kualitas jaringan internet, terutama pada kecamatan yang masih mengalami blank spot, untuk mendukung layanan digital dan penggunaan TTE secara efektif.

3. Penyempurnaan Kebijakan dan SOP Keamanan Informasi

Pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan, standar operasional prosedur, serta pemenuhan bukti dukung terkait keamanan informasi untuk meningkatkan nilai Indeks KAMI pada tahun berikutnya.

4. **Monitoring dan Evaluasi Berkala**

Monitoring keamanan sistem elektronik, termasuk penanganan insiden siber, perlu dilakukan secara rutin dan terkoordinasi untuk mencegah gangguan layanan serta meningkatkan kesiapsiagaan keamanan siber.

Painan, Desember 2025

Disetujui oleh:
Pengguna Anggaran



WENDI, S.H., M. Hum
NIP. 19760407 199803 1 005

Disusun oleh:
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



ISMAN, S.E., M.Si
NIP.19720805 201001 1 011